

INDUSTRI PARIWISATA

UNTUK MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN

Minta Harsana dan Maria Triwidayati
Mahasiswa S3 Kajian Pariwisata UGM

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pariwisata merupakan suatu bidang yang bersifat padat karya, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain itu pengembangan Pariwisata berkelanjutan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadikan rakyat sebagai sasaran akhir yaitu menciptakan kesejahteraan. Namun demikian dalam pengembangannya perlu dibarengi dengan peran serta masyarakat untuk secara aktif menjaga citra dan menjamin kenyamanan serta keamanan wisatawan. *Kesadaran kolektif tentang arti penting sektor pariwisata bagi ekonomi kerakyatan benar-benar diperlukan dalam membangun sebuah industri pariwisata.*

Kata Kunci : *Industri ,Pariwisata,Ekonomi Kerakyatan*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan suatu bidang yang banyak menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan bahkan sering disebut sebagai suatu bidang yang "padat karya" yaitu sektor atau bidang yang mampu menyerap tenaga kerja manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Dikatakan juga bahwa pariwisata bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan (Damanik dkk, 2005). Salah satu cara melihat peran pariwisata adalah dari program internasional dalam mengurangi kemiskinan dan harmonisasi sosial yang telah dimulai sejak hari pariwisata dunia tahun 2003, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan antara lain jaringan *Sustainable Tourism-Eliminating Poverty* (STEP) yang mengkoordinasikan pilot project dan mobilisasi pendanaan. Peran pariwisata dalam mengurangi kemiskinan, sangat signifikan, meskipun kadangkala belum merata menjangkau seluruh

masyarakat. Pariwisata sebagai sektor produktif memiliki keunggulan dibandingkan dengan sektor lain, yaitu:

1. Memiliki potensi lebih besar untuk *link* dengan pengusaha lokal lainnya karena customer datang ke daerah tujuan wisata,
2. Intensif tenaga kerja dan penyerapan tenaga wanita relative tinggi,
3. Potensial pada negara-negara miskin dan wilayah yang tidak memiliki daya saing komoditi ekspor
4. Produk pariwisata dapat dikembangkan berdasarkan sumber daya alam dan budaya yang merupakan asset yang dimiliki masyarakat lokal. (<http://www.hildiktipari.org/>) .

Lebih lanjut perkembangan pariwisata dewasa ini yang mengarah kepada pariwisata berkelanjutan berdasar pada prinsip pengembangan yang berpijak kepada keseimbangan aspek pelesatarian/pengembangan serta berorientasi ke depan (jangka panjang).Penekanan kepada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat,pengelolaan sumber daya yang tidak merusaknamun berkelanjutan untuk jangka panjang baik secara sosial, budaya, ekonomi.Ada keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan,lingkungan hidup dan masyarakat lokal. (Windu Nuryanti 1995:22).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menghendaki partisipasi semua pihak yang berperan di dalamnya dan juga kepemimpinan politik yang tegas dari pemerintah untuk memastikan cakupannya dalam skala yg lebih luas guna pembentukan konsensus. Untuk mencapainya tentu saja diperlukan usaha yg terus menerus, namun pada akhirnya akan membawa manfaat yg baik terhadap masyarakat. Di samping itu meningkatkan kesadaran mereka tentang sesuatu yg berkelanjutan dan mempromosikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan diantara mereka.

Disamping jumlah wisman yang makin meningkat, saat ini pun telah terjadi perubahan *consumers-behaviour pattern* atau pola konsumsi dari para wisatawan . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati *sun-sea and sand*, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau

kreasi budaya (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*) serta *nature* atau eko-wisata dari suatu daerah atau negara.

PEMBAHASAN

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Sebelum diluncurkan pengembangan pariwisata berkelanjutan (Sustainable tourism) di Indonesia, telah dikembangkan pula pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism/CBT). Sub sektor pariwisata diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau *community-based tourism development*. Program ini berawal pada bulan Juli 2000, Bank Dunia mulai memikirkan tentang cara menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata dengan meluncurkan istilah . yang kemudian dikenal dengan “ community-based tourism ” (CBT). Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni adventure travel , cultural travel dan ecotourism . Dibahas pula kaitannya dengan akomodasi yang dimiliki oleh masyarakat atau disebut *small family-owned hotels* yang biasanya berkaitan erat dengan tiga jenis kegiatan tersebut. Bank Dunia yakin bahwa peningkatan wisata adventure , ecology dan budaya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat disekitarnya. Selain itu CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan.

Dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan

hasilnyapun langsung dinikmati oleh mereka (Setyanto P. Santosa, 2002 dalam <http://kolom.pacific.net.id>)

Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, fungsi dan tujuan pengembangan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun nasional yang diwujudkan melalui penerimaan devisa langsung maupun tak langsung dari kegiatan pariwisata,
2. pengembangan wilayah dan daerah tertinggal melalui aktifitas kepariwisataan,
3. mendorong upaya pelestarian dan pengembangan sumberdaya alam dan budaya,
4. mendorong tumbuhnya rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, serta
5. mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Pemberdayaan masyarakat).

Penguatan dan peningkatan kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* penting di luar unsur pemerintah dan swasta untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dan strategis sebagai subyek maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan. Sebagai subyek pengembangan masyarakat menjadi pelaku penting dan terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan. Sebagai penerima manfaat masyarakat memperoleh nilai manfaat ekonomi signifikan dari pengembangan kegiatan kepariwisataan yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat

Namun demikian, sektor pariwisata harus menyadari bahwa berbagai daya kreasi di sektor ekonomi rakyat akan menjadi daya tarik wisatawan asing karena berbagai produk yang dihasilkan oleh ekonomi rakyat ini sangat jelas memuat "*local contents*" "*uniquely Indonesia*" dan "*typically local*". Kita bisa lihat berbagai kerajinan songket, ukiran kayu, anyaman, produk yang terbuat dari biota laut, dan aneka jenis makanan dan minuman merupakan sesuatu yang layak dijual. Hal yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan mutu, ukuran, keamanan, kemasan, dan pola pemasaran.

Berkenaan dengan hal itu, Pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil menengah (UKM) sehingga tercipta pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat

menengah ke bawah. Hidup matinya UKM di pusat-pusat kerajinan sangat bergantung pada industri pariwisata. 80% pelaku bisnis pariwisata adalah usaha kecil menengah (pernyataan Jero Wajik pada tanggal 1-6-2011)

Namun demikian Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia dan Thailand. Pemerintah Malaysia dan Thailand menganggap bahwa industri pariwisata adalah urat nadi ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil. Apabila terjadi penurunan jumlah wisatawan, akan berimbas langsung bagi para pengusaha kecil. Oleh karena itu dua negara tersebut sangat serius membangun industri pariwisata. Keseriusan pemerintah diimbangi dengan peran serta masyarakat di kedua negara tersebut yang sangat menyadari industri pariwisata telah menjadi urat nadi bagi kehidupan dan kelangsungan usaha mereka. Masyarakat secara aktif turut memberikan layanan, kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, terutama wisatawan Mancanegara.

Hal itu berbeda dengan di Indonesia, yang dari sisi pemerintah belum serius dalam mengembangkan kepariwisataannya, di tambah lagi belum ada kesadaran kolektif tentang arti penting industri pariwisata bagi ekonomi kerakyatan. Kesadaran rakyat tentang arti pentingnya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan masih sangat kurang. Hal itu tampak dari jaminan keamanan kepada turis asing atau wisman masih sangat sangat memprihatinkan. Para wisman kerap kali justru menjadi korban kejahatan. Padahal, jaminan keamanan kepada para wisman adalah *comparative advantage* dan *added value* dalam industri pariwisata. Beberapa waktu lalu misalnya, dua orang wisman asal Korea Selatan (Korsel) dan Inggris, yang sedang berbelanja di Mangga Dua dan Atrium Senen, Jakarta Pusat, telah menjadi korban aksi perampokan. Kasus di Bali lebih tragis lagi, turis wanita Jepang bukan saja menjadi korban pemerasan namun juga menjadi korban pelecehan seksual (<http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2011/06/26/industri-pariwisata-indonesia>). Selain itu juga belum meratanya kesadaran para pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan usaha seperti misalnya oknum pedagang lesehan yang seringkali mematok harga makanan jauh di atas harga standar untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Sering pula terjadi tukang becak yang menaikkan harga jauh melebihi harga normalnya. Hal-hal seperti

tersebut di atas apabila dibiarkan akan merusak citra mereka sendiri dan sekaligus merusak citra pariwisata daerahnya.

Peran serta aktif masyarakat harus ditumbuhkan dengan jalan dilakukan pembinaan oleh instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata. Secara rutin Dinas Pariwisata harus selalu mengumpulkan dan memberikan masukan-masukan kepada pelaku usaha pariwisata agar kesadaran mereka untuk menjaga citra pariwisata terus berkembang. Selain itu biasanya para pelaku usaha membentuk kelompok-kelompok seperti kelompok koperasi ataupun kelompok arisan yang tujuan utamanya adalah untuk menjalin silaturahmi antar teman seprofesi. Contohnya adalah Koperasi Pedagang Asongan Prambanan, Kelompok Tukang foto, Paguyuban tukang becak, paguyuban pedagang lesehan dan opedagang kaki lima, dan sebagainya. Mereka selalu mengadakan pertemuan rutin. Pada acara itulah biasanya dilakukan penyuluhan-penyuluhan yang tujuannya agar para pelaku usaha pariwisata tersebut memiliki kesadaran untuk memberikan yang terbaik bagi wisatawan. Selain itu mereka juga membuat komitmen bersama mengenai aturan-aturan dalam menjalankan usahanya, dan apabila ada yang melanggar, maka teman-teman lain akan menegur dan apabila sudah sulit disadarkan maka mereka memberikan hukuman moral berupa pengucilan dari komunitas tersebut.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hal itu karena pariwisata merupakan suatu bidang yang bersifat padat karya, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain itu pengembangan Pariwisata berkelanjutan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadikan rakyat sebagai sasaran akhir yaitu menciptakan kesejahteraan. Namun demikian dalam pengembangannya perlu dibarengi dengan peran serta masyarakat untuk secara aktif menjaga citra dan menjamin kenyamanan serta keamanan wisatawan. *Kesadaran kolektif tentang arti penting sektor pariwisata bagi ekonomi kerakyatan benar-benar diperlukan dalam membangun sebuah industri pariwisata.*

REFERENSI

- Anom, I Putu. 2010. *Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development)* dalam <http://balisustain.blogspot.com/2010/08/pembangunan-kepariwisataan.html>
- Damanik, Janianton. Kusworo, Hendrie Adji. Raharjana, Destha T. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Puspar UGM.
- Kusmayadi. *Tantangan dan Peluang Tenaga Kerja Pariwisata Luar Negeri*. Dalam http://www.hildiktipari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70:tantangan-dan-peluang-tenaga-kerja-pariwista-luar-negeri&catid=1:latest-news
- Nuryanti, Windu. 1995. *Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan untuk Kepariwisata Alam*. Dalam Chafid Fandeli. Ed. *Dasar-dasar manajemen Kepariwisata alam*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Setyanto P. Santosa, 2002 . *Pengembangan Pariwisata Indonesia*. Dalam <http://kolom.pacific.net.id>
- Sutrisna, Kadek Fendy. 2011. ***Industri Pariwisata Indonesia***. dalam <http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2011/06/26/industri-pariwisata-indonesia>.
- Swarbrooke, J. 2004. *Sustainable Tourism Management*. CABI Publising. Oxon, UK.